
POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN DAN HADITS

Indra Efendi¹⁾ Charles²⁾

^{1,2)} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi

Email: indr4efend1@gmail.com

Charlesmalinkayo.cc@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui politik identitas dalam perspektif Al-Quran dan hadits. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang metode pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadits. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur dan publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber untuk penelitian yang akan diteliti penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pendidikan dalam perspektif Al-Quran adalah: Syarat pemimpin dalam Islam: 1) Islam, 2) Pria, 3) Taklif, 4) Ilmu Pengetahuan, 5) Adil, 6) Kemampuan dan kecakapan, dan 7) Sehat jasmani dan rohani. Konsep-konsep kepemimpinan di dalam hadis Nabi saw yaitu: (1) kepemimpinan merupakan sebuah keharusan, (2) taat kepada pemimpin merupakan kewajiban dengan pengecualian jika sang pemimpin memerintahkan untuk melakukan maksiat, (3) pemimpin hanya boleh ada satu karena jika lebih dari itu, potensi perpecahan dan silang kebijakan sangat besar, (4) pemimpin harus ditunjuk oleh rakyat, (5) mendaulat diri sebagai pemimpin merupakan suatu hal yang tidak etis, (6) pemimpin harus dari kalangan laki-laki, dan (7) kepemimpinan harus dipegang oleh suku Quraisy.

Kata Kunci: Politik identitas, perspektif, Al-Quran, hadits.

Abstract

The research objective is to find out identity politics in the perspective of the Al-Quran and hadith. This study uses a qualitative approach, namely to describe and elaborate on educational methods from the perspective of the Koran and hadith. The data collection technique used in this research is library research (Library Research) where library research is the activity of collecting materials related to research originating from the Al-Qur'an, Hadith, books, scientific journals, literature and other publications that are worthy of being used as sources for research that will be examined by the author. The results of the study show that educational methods in the perspective of the Koran are: Requirements for leaders in Islam: 1) Islam, 2) Men, 3) Taklif, 4) Knowledge, 5) Fair, 6) Ability and skills, and 7) Physically healthy and spiritual. The concepts of leadership in the hadith of the Prophet saw are: (1) leadership is a must, (2) obedience to the leader is an obligation with the exception if the leader orders to commit immorality, (3) there can only be one leader because if there are more than that, the potential for division and cross-policy is very large, (4) the leader must be appointed by the people, (5) self-reliant as a leader is unethical, (6) the leader must be from among men, and (7) leadership must be held by the Quraysh.

Keywords: Identity politics, perspective, Al-Quran, hadith

PENDAHULUAN

Turunnya Al-Quran untuk mengatur, memberi arahan dan menjadi pedoman manusia dalam segala urusan agar mencapai kesuksesan baik di dunia dan Akhirat. Sehingga tidak ada satupun sesuatu yang terlepas dari pembahasan Al-Quran, termasuk politik. Bahkan sebelum suara ajakan berkumandang Al-Quran sudah terlebih dahulu memberikan nilai-nilai dan etika. Membahas terkait kontestasi politik yang tersaji di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang menarik.

Heterogenitas bangsa Indonesia menjadi hal tersendiri yang perlu menjadi sorotan. Karena, dalam proses mendapatkan kemenangan dalam pertandingan politik tentunya butuh instrumen kuat untuk mendapatkan kemenangan. Identitas Ras, Etnis, Suku, Agama pun menjadi barang unik ketika ajang perebutan politik berjalan.

Dalam Lubabal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul Jalaluddin al-Suyuthi menuliskan bahwa latar belakang turuNnya ayat 13 dari Surah AlHujurat adalah ketika setelah Fathu Makkah Bilal bin

Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Dengan kejadian ini didapati beberapa sahabat melontarkan ejekan dalam segi fisik Bilal bin Rabah. Lalu hadirlah ayat ini sebagai tanggapan perilaku tersebut bahwa Islam tidak mendikotomikan hamba berdasar pada segi fisik, ras, suku ataupun kedudukan. Islam memandang bahwa yang mulia adalah yang baik akhlak dan takwanya (Jalaluddin et al, 2008).

Menurut Syafii Maarif: “Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam mengawal keutuhan bangsa. Mulai dari pengalaman sejarah yang terwujud dalam pergerakan Nasional, Sumpah Pemuda, Pancasila dan adanya tekad bulat untuk mempertahankan serta membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam kontekskeagamaan, kita temukan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua sayap besar umat Islam yang telah menyatakan dan mengukuhkan badan menjadi benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meski sering digerogoti oleh politisi salah tingkah dalam perjalanan perpolitikan pasca proklamasi, lebih dari 6 dasawarsa Indonesia bertahan dengan segala keberuntungan dan malapetaka yang dialaminya. Tantangan yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai gerakan sempalan agama dengan politik identitasnya masing-masing (Syafii Maarif et al ,2012).

Berdasarkan pada argumentasi dan fenomena yang ada di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran. Karena dalam beberapa kejadian belakangan yang cukup menarik adalah bahwa Al-Quran dan hadits itu sendiri yang dijadikan objek dalam sukseksi politik identitas yang sedang berjalan di Indonesia. Maka sangat perlu dilakukan telaah terkait pandangan Al-Quran dan hadits atas politik identitas tersebut. Demi upaya melestarikan dan merawat keutuhan sekaligus kerukunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara pengertian, politik identitas berasal dari dua kata yaitu: politik dan identitas. Pertama kita tinjau terlebih dahulu makna politik, secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yakni *Politeia* atau polis yang berarti Kota atau Negara. Miriam Budiardjo memberikan makna etimologi politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuantujuan itu (Miriam Budiardjo, 2002). Secara etimologis identitas berasal dari kata *identity* yang bermakna sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalnya agama, suku, ras dan antar golongan yang membedakan lainnya.

Maka kemudian yang menjadi pengertian daripada politik identitas adalah menjadikan identitas sebagai alat politik suatu kelompok untuk tujuan tertentu baik untuk perlawanan atau menunjukkan identitas jati diri dari kelompok tersebut. Menurut Sri Astuti Buchari: “Politik identitas merupakan alat politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya tekanan seperti ketidakadilan politik yang sampai mereka rasakan.

Inilah hal-hal penting yang mendasari pemikiran penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait politik identitas dalam perspektif Al-Quran. Sehingga akan tercapainya pemahaman yang utuh dalam memahami realita politik yang bergulir di masyarakat dalam bingkai Al-Quran.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dikategorikan penelitian perpustakaan (*library research*) karena data yang diteliti bersumber kepada kitab-kitab hadis, buku, Jurnal-jurnal, dan hasil penelitian sarjana dan ulama muslim. Data yang digunakan terbagi dua, data primer dan sekunder. Data primer mencakup hadis-hadis Rasul yang membicarakan tentang aqidah. Data sekunder sebagai pendukung data primer, diambil dari buku dan hasil peneitian relevan yang berhubungan dengan fokus kajian. Analisis data menggunakan metode analisis teks. Alquran dan Hadis-hadis tentang politik identitas dikumpulkan kemudian dianalisis satu persatu isi kandungannya, maksud dan tujuannya sehingga jelas pendidikan aqidah yang diungkapkan dan terakhir diberi tema sesuai dengan isi Al-Qur'an dan hadis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Konsep Politik

Politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani kuno atau bahasa Latin, *politicos* atau *ploticus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti warga Negara atau warga kota. Dalam bahasa Inggris, kata politic menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan yang berarti bijaksana (Jazilul Fawaid, 2012). Politik diartikan pula sebagai kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani sesuatu masalah). Kata ini juga dipergunakan sebagaimana bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik (salim et al, 2002)

Secara istilah, “politik” pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang di bahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.

Politik juga mempunyai beberapa fungsi yang terbagi dalam fungsi-fungsi masukan dan fungsi-fungsi keluaran. Yang pertama adalah fungsi-fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerja sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Sosialisasi Politik. Sosialisasi antara lain berupa proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya.
 2. Rekrutmen Politik. Yang dimaksud adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi.
 3. Artikulasi Kepentingan. Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Yakni masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan melalui kelompok-kelompok dengan kepentingan yang sama.
 4. Agregasi Kepentingan. Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan, atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan, atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu.
 5. Komunikasi Politik. Fungsi ini merupakan alat penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya.
- Dalam hal ini terlihat bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

Komunikasi Politik Suatu bahasan penting dalam mengenal politik adalah mengenal komunikasi politik, untuk memahami opini atau publik ada gunanya mengetahui sesuatu tentang komunikasi politik. Komunikasi adalah penggalan informasi untuk memperoleh tanggapan, pengoordinasian makna antara seorang dan khalayak, saling berbagai informasi, gagasan, atau saling berbagai unsur-unsur perilaku bahkan sebagai modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan penyesuaian pikiran bersama dalam kelompok internal maupun eksternal.

Terdapat macam-macam definisi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang disetujui kekuasaan dan pemegang kekuasaan, Pandangan yang beragam itu sesuai dengan yang biasa dilakukan orang, mencakup sesuatu yang dilakukan orang.

Politik terjadi dalam setiap pengaturan politik yang ditandai dengan perselisihan, apakah pengaturan itu berjumlah negara, sekecil perkumpulan poker, atau bahkan dua orang. Bagaimanapun kita akan menggunakan istilah itu pertama-tama dalam arti konvensional yang lebih ketat, dan membahas konflik sosial dengan menggunakan lembaga-lembaga pemerintah.

Budaya politik cenderung berlaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan mengkompromikan empiris, dalam arti pendapat orang peroranglah yang sedang melakukan penelitian.

Terkait politik, contoh, yang lebih abstrak dengan alasan yang dibuat oleh seseorang tanpa terlebih melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui penelitian yang melibatkan orang banyak. Budaya politik adalah cara orang berpikir, mendukung, dan berusaha melawan sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk juga bagian atas yang mereka miliki di dalam sistem politik. Orientasi atau kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi tiga, yaitu:

Pertama, memahami kognitif, yaitu menciptakan pengetahuan dan meminta warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu yang memahami perilaku pemimpin-pemimpin mereka melalui pemberitaan massa, merupakan contoh dari memahami kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini tidak boleh. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar individu.

Kedua, percakapan afektif. Orientasi ini berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif bergerak di dalam interaksi perasaan. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti bantuan tunai langsung, Askeskin, pembagian kompor gas, dan sejenisnya sesuai dengan maksud untuk mengubah afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat mendapat dukungan dari pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

Ketiga, orientasi evaluatif. Orientasi ini merupakan campuran antara fokus kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan / tindakan. Misalnya, setelah mengetahui tentang partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, masing-masing memilih mereka di dalam pemilihan. Atau, kelompok individu yang menggabung unjuk rasa untuk mendukung seorang kandidat yang tengah diserang oleh para lawan politiknya, satu-satunya yang bisa mereka kenal dan sedikit tahu akan jati diri si politisi termaksud.

Dalam sejarah, banyak orang jenius yang bertekuk lutut di bawah tekanan kakinya, dan terjerat dalam bingkai eksploitasi. Para tiran akan berusaha menghancurkan orang-orang jenius itu. Sebaliknya, pemerintahan Islam akan memutuskan menciptakan atmosfer terbuka yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang semacam itu. Pengalaman sejarah Islam yang unik telah memberikan kesaksian atas kenyataan faktual semacam itu. Islam mengembalikan kebebasan dan martabat manusia yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dari ras, keturunan, kedudukan atau kekayaan (Sayyid Qutub, 2004).

Pada mulanya, banyak dari mereka yang ada di masyarakat pra-Islam bersetatus budak atau yang menjalani hidup nyaris seperti seorang budak. Namun pada akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bermartabat di kemudian hari. Mereka mampu membuktikan diri sebagai kehidupan, suka intelektual, politik, dan militer. Dalam individu yang kreatif dalam berbagai bidang, kemajuan individu, kapasitas dan politik Islam tak satu pun yang sanggup

menggerakkan tensi sendiri. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai menulis surat kepada gubernurnya di Mesir: "Menyetujui kinerja dan kerja keras setiap individu. Jangan mengukur prestasi seseorang dengan prestasi orang lain. kecil dari seorang besar menjadi besar dan pekerjaan menjadi besar dari seorang kecil menjadi remeh. Konsepsi politik lain melandasi pemerintahan Islam terkait langsung dengan posisi aktual para penguasanya. Dalam pemerintahan Islam, para penguasa akan menjalankan kehidupan pribadi yang diajukan layaknya warga yang lain. Dalam kehidupan sosial, tidak ada perbedaan antara dirinya dan warga negara yang ada dalam pemerintahannya. Umpama dalam hal interaksi, kepemilikan rumah, dan interaksi dengan orang lain.

Bahkan jabatan resmi itu sendiri tak bisa diposisikan sebagai contoh atau idaman yang sempurna diteladani dan dikejar. Demi melanggengkan kekuasaan atas rakyat, para penguasa zalim, melakukan tipu daya untuk mereka. Mereka mengeluarkan perjanjian- perjanjian yang diumumkan antara diri mereka dengan rakyat yang mereka kuasai. Namun dalam kehidupan praktis, perjanjian-perjanjian ini tidak lebih dari kata ganti kata-kata yang tidak memiliki arti apapun dan penyelesaian guna pertolongan yang timbul di antara kehidupan para penguasa dengan rakyat jelata dan antara hak-hak prerogatif, pertama dengan ketidakberdayaan kelompok kedua. Dalam pemerintahan Islam, konsep ini bukan suatu bahan perjanjian yang dituliskan dengan kata-kata yang indah memikat. Akan tetapi, diterapkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata, dialokasikan oleh pengalaman sejarah Islam dan bahkan penempatan di masa kita sendiri. Pengalaman sejarah berbicara kepada kita tentang pemerintahan Islam, Ali bin Abu Tholib, berdiri di hadapan hakim di samping rakyat biasa yang membuat pengaduan mendukung. Dalam masalah tersebut, pengadilan memutuskan penggugat dan pemohon untuk memberikan keputusan di antara mereka.

Pada acara lain selama masa pemerintahan Umar bin Khathab, seorang Yahudi, yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, mengadukannya dengan Ali bin Abu Tholib kepada Umar. Sang khalifah mengundang Yahudi dan sepupu Nabi suci itu ke pengadilan. Ketika khalifah sedang mendengarkan mereka, ia memperhatikan gelagat terhormat dan kekalahan di wajah Ali, dan mengira bahwa ia telah menyatukan Ali karena ia meminta keadilan dengan para leluhur. Namun Ali berkata kepada Umar, "Aku tidak senang karena kamu tidak meminta sama kepadaku dan kepadanya. Kamu mendukung sikap lebih menghargai kepadaku dan memanggilku dengan nama julukanku, namun kamu tidak bisa melakukan hal yang sama kepadaku.

Ali bin Abi Thalib sebagai berkata, "Haruskah aku bahagia akan diriku sendiri dengan panggilan Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman), dan tidak sanggupkah aku bersimpati kepada mereka yang mempertanyakan hidup, dan tidak bisakah aku menjadi satu teladan bagi mereka dalam mengarungi kehidupan pahitnya?" Program yang pemerintah Islam tanamkan ke kehidupan sehari-hari yang praktis di kelas tidak perlu diraih dengan bakat baru. Ia memunculkan setiap individu yang terlibat sehingga memunculkan program ini merupakan masalah hormon dan prestise yang dimilikinya demi menanggapi aktivitas-aktivitas yang diprakarsai oleh pemerintah.

Dalam hal ini melalui sejarah Muslim, kita menjumpai contoh-contoh unik yang tidak ditemukan sejarah bangsa bangsa lain. Contoh-contoh ini terkait dengan eksklusif dengan kurun Nabi suci melihat dan penerus-penerus beliau. Namun juga bisa terlihat dalam periode yang disapu bersih oleh badai dahsyat dari perjuangan-ambisi kaum tiran. Misalnya, kita menemukan selama pemerintahan Umar bin Abid Aziz pasukan Muslim di bawah perintah Qutaibah mengeluarkan

fakta pertahanan bersama dengan penduduk Samarkand (Andi Rahman , 2012). Namun, masuklah mereka ke dalam kota, pasukan Muslim gagal untuk menerima tanggung jawab yang telah mereka sepakati. Penduduk Samarkand mengadukan hal itu ke khalifah, yang diminta kepala penaklukan agar datang bersama wakil-wakil penduduk kota di hadapan *qadhi* (hakim), sehingga ia dapat memutuskan perselisihan mereka. *Qadhi* mengeluarkan keputusan yang memuaskan penduduk kota, dan membatalkan keputusan penakluk. Pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan suatu pertemuan penakluk dikecewakan, dan itu bukan oleh suatu organisasi dunia atau forum internasional namun oleh pengadilan yang pemerintahannya memiliki peradilan semacam itu. Perilaku pemerintahan Islam merupakan manifestasi ayat AlQur'an ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, jadilah saksi dengan adil. Dan tolonglah sekali-kali kebencian kamu terhadap seorang pria mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Mâ'idah: 8)

Tak pelak lagi sebagai sekiranya pemerintahan Islam memperlakukan diri sendiri dengan semangat ini di panggung internasional, jiwa manusia akan dibangun di tengah-tengah masyarakat dunia, konsepsi keadilan dan ketulusan akan disuntikkan untuk mereka dan mereka akan distimulasi ke barisan bersama di jalur kebajikan dan kejujuran.

Pada umumnya, istilah umum negara Islam itu tidak diperebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi konsep negara itu dalam Islam, karena secara substansial termasuk ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan keterwakilan pemerintahan pada umat Islam. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Nabi tetapi juga pemimpin umat yang dapat disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tidak ada satu pun ayat yang menunjukkan tentang pengaturan negara.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan politik umat Islam, sehingga semua perilaku dan budaya politik umat Islam harus sesuai dengan pemikiran. Di samping prinsip-prinsip tersebut, di dalam agama Islam juga terdapat di makna-makna, hukum di tempat, hukum di bidang ibadah, ahwal *al-syakhshiyah* (hukum perorangan), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum kejahatan) serta *siyasah* (hukum tata negara). Agak berbeda dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang lebih tinggi itu universal, sebagian hukum Islam ada yang partikular, yang hanya disukai oleh umat Islam saja, demikian pula hukum umum, hukum ini juga rasional. Oleh karena itu, jika implementasi prinsip-prinsip universal yang relatif lebih mudah dilakukan asalkan ada kemauan politik dari pemerintah dan kekuatan politik, maka implementasi hukum-hukum partikular secara keseluruhan adalah kemudahan yang mudah dan bahkan dilematis (Maskuri Abdillah, 2007).

Politik Identitas

Identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.

Kalau dilihat dari pengertian dalam kajian sosiologi kontemporer, politik identitas tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang beku, tetap, tak berubah. Identitas dipahami sebagai sebuah

konstruksi sosial yang dibentuk terus-menerus, bahkan selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat oleh masyarakat. Merunut pada pengertian tersebut, Identitas akan selalu melapisi gerakan seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam kajian sosiologi, etnisitas dibedakan dari ras, kelas, dan status sosial yang merupakan salah satu unsur stratifikasi sosial masyarakat. Melihat dari perkembangan yang terjadi di Indonesia, Politik identitas yang terjadi lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah. Dengan melihat dari berbagai hasil studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu munculnya politik identitas. Praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas; suku, agama dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih tercapainya suatu tujuan (Wantona Saradi ,2018).

Ketiga, bagi Hasyim Asy'ary, Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan secara baku. Dalam amanatnya, ia mengatakan bahwa kompilasi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak ada yang menerima pesan apa pun tentang bagaimana memilih kepala negara. Karena itu, pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi tentang kenegaraan tidak ditentukan dan umat Islam tidak diperlukan untuk mengambil satu sistem. Yang terpenting adalah sistem tersebut dapat mewujudkan tiga tujuan politik seperti di atas.

Selain beliau, juga ada pemikiran lain yakni KH. Syaifuddin Zuhri beliau adalah ulama yang produktif dalam menulis, dalam Islam menurut beliau ada tiga faktor penting itu untuk bisa dicapai. Pertama, Islam pada dasarnya agama yang mekedepankan kecerdasan berfikir dalam soal kepercayaan dan keyakinan. Kedua, dalam Islam dapat ditemukan landasan budaya yang praktis dan masuk akal. Ketiga, Islam merupakan unsure kekuatan baru yang tumbuh dan selalu tumbuh terus, penuh dinamika dan menggandung harapan-harapan baru.

Kepentingan Politik Identitas Islam Selama ini ada kerancuan berpikir. Kegiatan politik identitas umat Islam terlalu umum, sama dengan kegiatan dakwah dan sosial sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan *akhlāqul karīmah*. Tentu saja semuanya adalah hak masing-masing, tetapi yang menyebabkan agama “kekuatan moral. Dalam beridentitas tujuan itu harus jelas. jelas bergerak politis, harus spesifik, agar orang tahu apa yang perlu dikerjakan, dan untuk apa dia bergerak. Politik identitas adalah kekuatan pemaksa dan tidak "mendukung" kekuatan moral. Politik identitas memerlukan kebijakan publik, bukan kesalehan pribadi (Muhammad Al-Burai, 1986).

Sebagian orang memakai teori dan konsep "sekuler" untuk menjelaskan kepentingan-kepentingan politik identitas umat, sehingga sering Islam disalahpahami atau orang berpikir demikian Islam tidak punya teori dan konsep yang murni (asli). Label "fundamentalis" atau "skripturalis" atau "literalis" membuktikan bahwa kita punya masalah dengan terminologi.

Ada dua isu politik identitas yang penting dalam moralitas, yaitu moralitas publik dan moralitas politik. Sebagai moralitas keduanya berasal dari moralitas pribadi. Moralitas pribadi menjadi moralitas publik karena pemasyarakatan (sosialisasi, sosialisasi), sedangkan moralitas pribadi jadi moralitas politik identitas karena pelebagaan.

Selama ini umat Islam hanya pasif, karena itu mereka selalu ditinggalkan, seolah-olah hanya berguna pada waktu krisis memuncak. Kebetulan umat Islam punya “*crisis psychology*” sangat terampil dalam suasana krisis, tetapi tidak tau apa yang harus dikerjakan pada waktu normal. Sekarang umat Islam tidak berada di luar ataupun di pinggir, tetapi di pusat, sejarah politik Indonesia menunjukkan adanya pergeseran peranan umat Islam dari pinggir ke tengah, dan Islam harus mengatur jalanya roda berpolitik.

Hakikat Politik Identitas Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sampai kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan dari generasi ke generasi oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta, dengan demikian Al-Qur'an selalu dijaga terpelihara keasliannya dari generasi ke generasi hingga ahir zaman. Dan membaca Al-Qur'an dinilai ibadah, ini yang membedakan Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang lain seperti kitab-kitab nabi terdahulu atau hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Al-Quran adalah Kalam Allah Swt. yang sudah terejawantah ke dalam bahasa manusia yaitu bahasa Arab. Sebelum ditransformasi ke dalam bahasa Arab, Kalamullah tentu saja abstrak dan tidak dapat diterjemahkan oleh manusia, sebab tak ada yang bisa menggapai bahasa Tuhan. Namun setelah Kalamullah ini dikongkritkan ke dalam bahasa Arab, ia dapat dipahami oleh manusia.

Syarat pemimpin dalam Islam:

1. Islam

Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir (QS. Al-Imran: 28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.(Q.S. Al-Imron, 28).

Karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah.

2. Pria. Wanita menurut tabiatnya tidak cukup memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.
3. *Taklif*. Yaitu sudah dewasa, di mana posisi khalifah adalah penguasaan atas orang lain.
4. Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam dan bila memungkinkan mencapai taraf mujtahid. Pertanyaan umum tentang hukum internasional, perdagangan internasional, dan lain-lain.
5. Adil. Yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.
6. Kemampuan dan kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat, pemimpin juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam.
7. Sehat jasmani dan rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.

Hakikat Politik Identitas Dalam Hadits

1. Pemimpin harus ditaati

عن عبدالله بن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا

طاعة. (الألباني ت ١٤٢٠)، صحيح النسائي ٤٢١٧ • صحيح • أخرجه البخاري (٤١٧١)، ومسلم (١٨٣٩) واللفظ له.

(شرح رواية أخرى)

"Dari 'Abdullah ibn Umar: terhadap pemimpin muslim, dengar dan taatlah (kalian)!, baik dalam keadaan suka atau benci, kecuali jika (pemimpin itu) menyeruh kepada kemaksiatan maka jika (pemimpin itu) menyeru kepada kemaksiatan, janganlah (kalian) mendengar dan menaatinya! (HR Imam Nasa'i no. 4217, Bukhari no. 7144, Imam Muslim 1839).

Hadis tersebut menyeru kepada umat Islam agar mendengar dan menaati pemimpinnya dengan pengecualian jika pemimpin tersebut menyeru mereka kepada kemaksiatan.

2. Pemimpin Hanya Boleh ada satu

("Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a: Jika diangkat (dari kalian) dua Khalifah, maka bunuhlah salah satu dari mereka" (HR Imam Muslim no. 1853).

Kata "bunuh" dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin umat hanya boleh ada satu. Hal tersebut dikarenakan jika dalam satu ruang dan waktu ada dua pemimpin, maka akan terjadi kekacauan, baik itu disebabkan silang kebijakan atau berpotensi memecah belah umat.

3. Pemimpin Harus ditunjuk oleh Rakyat dan Makruh berhasrat untuk memimpin.

("Dari 'Auf Ibn Malik al-Asyja'i: Sebaik-baik pemimpin (dari kalian) adalah yang kalian mencintai mereka, dan mereka(pun) mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka, mereka(pun) mendoakan kalian, sedangkan seburuk-buruk pemimpin dari kalian adalah yang kalian marah (benci) terhadap mereka dan mereka(pun) marah (benci) terhadap kalian, kalian melaknat mereka dan mereka (juga) melaknat kalian (HR Bukhari (al-Jami') no.3258).

Hadis di atas mengindikasikan akan pentingnya sosok pemimpin yang dicintai rakyat dan oleh karena itu, maka ia juga merupakan hasil dari pemilihan rakyat. Pemimpin yang baik adalah yang dicintai dan didoakan oleh rakyat dan sang pemimpinpun mencintai dan mendoakan rakyat, sementara pemimpin yang buruk adalah mereka yang berada dalam posisi vis a vis dengan rakyat, mereka dibenci dan dilaknat oleh rakyat, begitu pula sebaliknya, mereka mengutuk dan membenci rakyat.

6. Pemimpin harus laki-laki

عن أبي بكر نفع بن الحارث: قال رسول الله ﷺ وقد بلغه أن القُرس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى ليُفليخ قومًا ولأولاً أمرهم امرأة) ابن

كثير (ت ٧٧٤)، البداية والنهاية ٧/٢٥٠ • أصله في صحيح البخاري • شرح رواية أخرى

"Dari Abu Bakrah Nafi' ibn Harits, Rasulullah saw bersabda: "dan (Rasulullah) telah (mengetahui sebuah) berita sesungguhnya Persia memiliki seorang puteri Kisra, orang yang menyerahkan (kepemimpinan) terhadap wanita tidak akan berhasil" (HR Imam Bukhari) Hadis mengenai tidak bolehnya perempuan memimpin memiliki latar belakang historis tentang kerajaan Kisra yang akan dipimpin oleh seorang puteri. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw memberi tanda bahwa ratu tersebut akan gagal dalam memimpin rakyatnya.

7. Pemimpin harus dari kaum Quraisy

عن معاوية بن أبي سفيان: إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ، لا يعاديهم أحدٌ إلا كَبَّه اللهُ على وجهِهِ؛ ما أقاموا الدِّينَ (الألباني ت)

(١٤٢٠)، صحيح الجامع ٢٢٤٤ • صحيح • شرح رواية أخرى

"Dari Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan: Sesungguhnya perkara (kepemimpinan) ini ada pada Quraisy, tidak ada yang akan menentang mereka kecuali Allah swt akan menindas (/melemparkan) wajah mereka (ke dalam neraka) selama mereka berpegang teguh terhadap agama (HR Bukhari (al-Jami') no. 2244).

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala bentuk kepemimpinan mengharuskan agar berada di tangan kaum Quraisy dan setiap kaum Muslim yang menentang hal tersebut akan masuk neraka.

KESIMPULAN

Syarat pemimpin dalam Islam: 1) Islam, 2) Pria, 3) *Taklif*, 4) Ilmu Pengetahuan, 5) Adil, 6) Kemampuan dan kecakapan, dan 7) Sehat jasmani dan rohani. Sedangkan konsep-konsep kepemimpinan di dalam hadis Nabi saw. adapun poin-poin tersebut ialah (1) kepemimpinan merupakan sebuah keharusan, (2) taat kepada pemimpin merupakan kewajiban dengan pengecualian jika sang pemimpin memerintahkan untuk melakukan maksiat, (3) pemimpin hanya boleh ada satu karena jika lebih dari itu, potensi perpecahan dan silang kebijakan sangat besar, (4) pemimpin harus ditunjuk oleh rakyat, (5) mendaulat diri sebagai pemimpin merupakan suatu hal yang tidak etis, (6) pemimpin harus dari kalangan laki-laki, dan (7) kepemimpinan harus dipegang oleh suku Quraisy.

REFERENSI

- Abdul Muin Salim, Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdul Rashid, Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka, 2001).
- Andi Rahman, Modus Suksepsi Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan A. Syafii Maarif, dkk, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita. (Jakarta: Democracy Project. 2012).
- Jazilul Fawaid, Bahasa Politik Al-Qur'an, (Depok : Azza Media, 2012), Cet. ke-1.
- Jalaluddin al-Suyuti, Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Jalaluddin Rahmat, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media.
- Maskuri Abdillah, Membangun Masyarakat Qur'ani, (Jakarta: Radians Presesi Media, 2007).
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002).
- Mifdal Zusron Alfaqi, Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas Serta Solidaritas. Dalam Jurnal: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Th. 28, No. 2, 2 Agustus 2015).
- Muhammad Al-Burai, Paradikma Politik Identitas Islam, (Bandung: Mizan, 1986).
- Rasyidi, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama, 2005).
- Sayyid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004).
- Shubhi Mahmasani, Falsafah Al- Tasyri' Fi- Islam, (Beirut: Dar al- Ilm li – almalayin, 1988).
- Sayyid Muhammad Baqir, Sistem Politik Islam, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001).
- Sayid Muhammad Baqir asy-shadr, Sistem Politik Islam.
- Sejarah, Dalam Jurnal Mumtaz, (Jakarta: Institut PTIQ, 2012), Vol.02, No.2.
- Sayid Muhammad Baqir asy-shadr, Sistem Politik Islam.
- Stephen Sulaiman Schwart, Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global, (t.tp, Blantika, 2007), Cet.1.
- Tim Penulis, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008).
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: PT. Perca, 1985) Jilid II.
- Umaruddin Masdar, Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2008) Cet. 1.
- Wantona Saradi. Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018).